

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk mencapai suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan di Daerah maka dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan normatif atau dasar hukum penyusunan Reencana Awal Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 sebagaimana ;
22. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08) ;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Reencana Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 – 2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA OPD dan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Reencana Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 adalah meningkatkan efisiensi dalam mencapai misi, tujuan, sasaran, program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai rencana pembangunan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai ketahanan pangan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renstra OPD, fungsi, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Landasan Pembentukan OPD, Landasan terkait pelayanan pelayanan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Landasan Pembentukan OPD, Landasan terkait pelayanan pelayanan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat uraian pokok bahasan dan susunan garis besar ini dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, SOTK, Uraian Tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ringkasan Sumber Daya yang dimiliki mencakup SDM, Asset, Modal, Unit Usaha yang masih beroperasi.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan Renstra periode sebelumnya, pencapaian SPM, MDGs, Interpretasi Tabel dalam Narasi.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan OPD, SOTK, Uraian Tugas, Identifikasi berdasarkan permasalahan di RPJMD

3.2. Isu-isu Strategis

Memuat isu-isu strategis berdasarkan permasalahan pada Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2026

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

4.1.2. Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK)

4.2. Cascading Kinerja PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Tahun 2019 – 2024
Tabel TC. 27 Cascading dan Mapping

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026

Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Tahun 2019 – 2024
Tabel TC. 28 Mapping sesuai RPJMD tanpa Pagu/Dana

BAB VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan pada PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memungkinkan terjadinya penggabungan atas urusan-urusan pemerintahan di daerah setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Atas dasar itulah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan dan urusan pertanian sub bidang peternakan.

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan dan urusan pertanian sub bidang peternakan;
- b. penyusunan perencanaan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, perikanan, konsumsi, keamanan pangan dan peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, perikanan, konsumsi, keamanan pangan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Pelaksana dan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
 - c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
 - e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
 - f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
 - i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;

- e. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan;
- h. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- d. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dinas dan kepegawaian serta pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

4. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- c. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan;
- f. mengkoordinasikan pemantauan harga bahan pangan pokok, penguatan lembaga distribusi pangan;
- g. mengkoordinasikan penyediaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan;
- h. mengkoordinasikan pengawasan keamanan pangan dan sertifikasi jaminan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- i. mengkoordinasikan peningkatan diversifikasi pangan dan pengolahan produk pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. mengkoordinasikan inventarisasi dan identifikasi pelaku usaha produk pengolahan pangan;
- k. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- l. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Kepala Bidang Perikanan, mempunyai tugas ;

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan peningkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya perikanan;
- h. mengkoordinasikan penyebaran dan pengembangan perikanan;
- i. mengkoordinasikan inventarisasi dan pendataan perikanan (statistik perikanan);
- j. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup bidang;
- k. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;

- l. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Kepala Bidang Peternakan, mempunyai tugas ;

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan peningkatan populasi dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta bina usaha kelembagaan peternakan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan peternakan;
- h. mengkoordinasikan pengawasan peredaran obat-obat hewan dan higienis pakan ternak;
- i. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- k. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas ;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas ;

- a. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

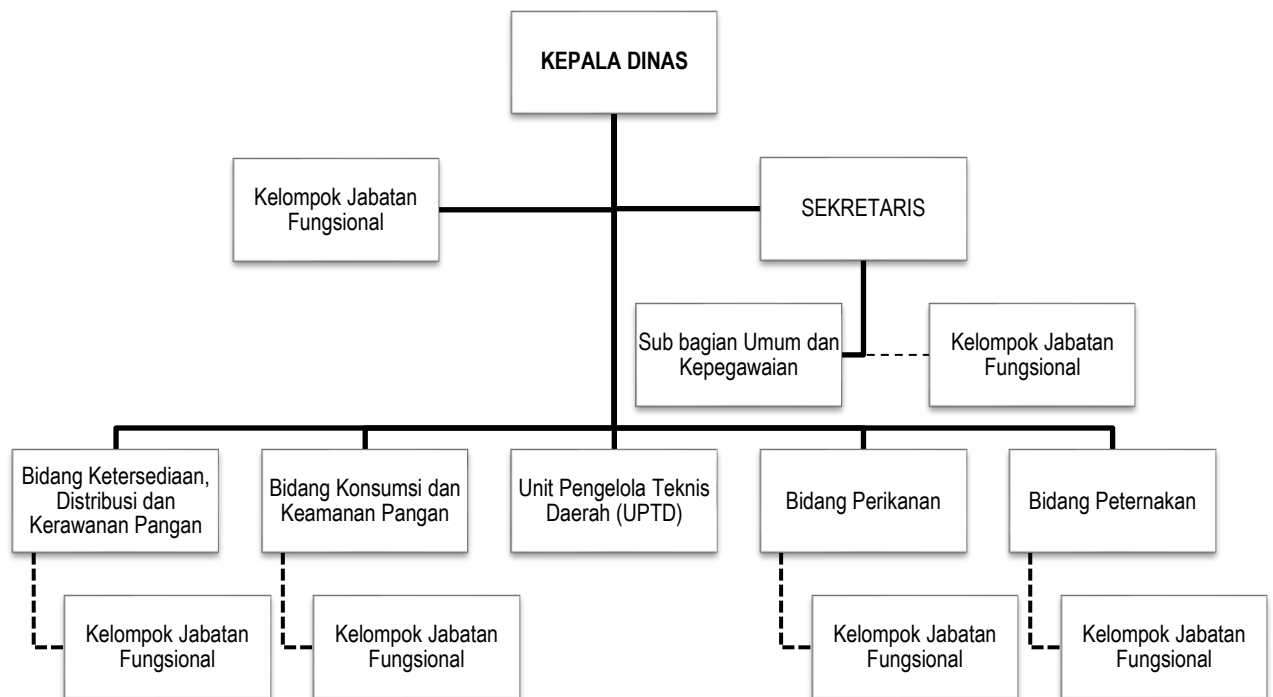
- a. UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan.
- b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Bidang Peternakan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA



2.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penggabungan antara Urusan Pangan yang berasal dari Kantor Ketahanan Pangan, Urusan Perikanan yang berasal dari Dinas Perikanan dan Peternakan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Peternakan) yang berasal dari Dinas Pertanian. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

- Pejabat Eselon II.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV.a : 5 orang
- Jabatan Fungsional : 7 orang
- Fungsional Umum : 17 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 3 orang
- Tenaga Honorer Daerah (non PNS) : 27 orang
- Tenaga PPB Pusat : 3 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana Strata 2 (S2) : 4 orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 24 orang
- Diploma 3 (D3) : 5 orang
- S L T A : 5 orang
- Tenaga Honorer Daerah (non PNS) : 25 orang
- Tenaga PPB Pusat : 3 orang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan. Sedangkan yang merupakan belanja program terdiri dari 8 (delapan) program, yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah bersama-sama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui suatu kebijakan yang mampu mengatur, membina dan mengawasi ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan			18,25	13,89	9,52	5,16	4,37	2,38	18,25	13,10	8,73	5,16	4,37	2,38	
2.	Indeks Ketersediaan (IK)			95,94	96,95	97,96	98,97	95,5	96	95,94	95,48	95,45	98,97	95,5	96	
3.	Indeks Keterjangkauan (IA)			75,07	75,57	76,03	76,57	77	77,5	76,97	75,04	75,25	76,57	77	77,5	
4.	Produksi Ikan Air Tawar			2.860,68	2.900	2.950	3.000	3.020	3.040	2.860,68	2901,402	2958,4	3.000	3020	3.040	
5.	Produktivitas Ikan Air Tawar			2,22	2,3	2,34	2,38	2,42	2,46	2,22	2,269415	2,19	2,38	2,42	2,46	
7.	Produksi Daging			415,28	539,86	701,82	842,19	1,14	1,482	415,28	749	730,830	842,19	1,140	1,482	
8.	Populasi Ternak :															
	Kerbau			10.028	10.078	10.129	10.179	10.149	10.199	10.028	10.043	10.048	10.179	10.149	10.199	
	Sapi			654	661	664	667	906	910,53	654	814	895	667	906	910,53	
	Kambing			2.393	2.417	2.429	2.441	2.137	2.147	2.393	2.185	2.105	2.441	2.137	2.147	
	Babi			9.438	10.382	12.458	16.196	26.417	34.342	9.438	21.483	20.013	16.196	26.417	34.342	
	Ayam			480.039	484.839	489.688	492.136	554.662	557.435	480.039	511.843	543.733	492.136	554.662	557.435	
	Itik			60.044	60.644	61.251	61.863	65.916	66.575	60.044	62.512	64.617	61.863	65.916	66.575	
9	PPH Konsumsi			87	88	89	90	91	92	87	88,9	89,1	90	91	92	
10	Konsumsi Energi			2144	2145	2146	2147	2148	2149	2144	2144	2146,8	2147	2148	2149	
	Konsumsi Protein			52	53	54	55	56	57	52	52	54,2	55	56	57	
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			67	68	69	70	71	72	67	69,23	69*	70	71	72	

Ket. :

* Nilai atau angka sementara

Tabel 2.3
Perkembangan tingkat pemenuhan kebutuhan pangan tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk (orang)	301.789	312.578	315.222	321.514	323.652
2.	Pangan karbohidrat (padi)					
	a. Produksi padi gabah kering panen (ton)	257.999,87	193.992,07	194.233,07	188.682,50	187.309,40
	b. Ketersediaan beras (ton)	137.720,02	123.534,15	123.687,62	120.152,90	94.928,40
	c. Kebutuhan konsumsi beras per kapita (kg)	119,28	116,2	99,7	94,8	90,03
	d. Total kebutuhan beras konsumsi (ton)	35.997,39	36.321,56	31.427,63	30.479,53	29.138,39
	e. Persentase ketersediaan beras sesuai kebutuhan (%)	382,58%	340,11%	393,56%	394,21%	325,78%
3.	Protein hewani					
	a. Daging					
	• Produksi daging (ton)	1,112	339,76	491,10	748,70	730,83
	• Kebutuhan konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	7,15	4,0	6,2	6,5	6,5
	• Total kebutuhan daging konsumsi (ton)	2,158	1,25	1,954	2,09	2,104
	• Persentase ketersediaan daging sesuai kebutuhan (%)	51,5	17,3	25,13	35,82	34,73
	b. Susu					
	• Produksi susu (liter)	297,151	294,99	365,28	367,16	368,927
	• Kebutuhan konsumsi susu per kapita (liter/kapita)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
	• Total kebutuhan susu konsumsi (liter)	392,326	406,351	441,31	450,12	453,112
	• Persentase ketersediaan susu sesuai kebutuhan (%)	75,74	72,6	82,77	81,57	81,42
	c. Telur					
	• Produksi telur (kg)	521,383	505,298	583,059	611,245	643,652
	• Kebutuhan konsumsi telur per kapita (kg/kapita)	6,0	6,0	6,2	6,3	6,5
	• Total kebutuhan telur konsumsi (kg)	1.810.734	1.875.468	1.954.376	2.025.538	2.103.738

Dari Tabel. 2.3 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pangan karbohidrat yang bersumber dari beras di daerah ini selama tahun 2019-2023 telah mencapai swasembada. Pencapaian swasembada pangan beras di Kabupaten Tapanuli Utara tidak diikuti dengan pencapaian swasembada pangan protein hewani yang berasal dari daging, susu dan telur. Guna mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikembangkan distribusi dan peningkatan akses pangan di masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan pembinaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Dari Tabel diperoleh bahwa Ketersediaan pangan utama yang berasal dari produksi secara rata-rata mengalami kenaikan. Sementara kebutuhan beras untuk dikonsumsi terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk. Kebutuhan beras konsumsi masih dapat diatasi dari produksi wilayah, hal ini dapat terlihat dari data ketersediaan beras untuk konsumsi juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah ketersediaan beras mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 produksi gabah mencapai 257.999,87 ton. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya mengalami tren kenaikan secara terus menerus. Hanya saja data terakhir Tahun 2023 menunjukkan produksi gabah meningkat yaitu 187.309,40 ton dengan perkiraan konsumsi beras perkapita pertahun adalah 90,03 kg/kapita/thn. Ini berarti bahwa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun ketersediaan beras lebih besar dari konsumsi. Sehingga dapat disimpulkan ketersediaan beras pada tahun 2023 adalah surplus.

Sedangkan untuk ketersediaan daging, tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ketersediaan daging tercatat 1,112 ton dengan tingkat konsumsi daging perkapita 7,15 kg/kap/tahun. Sedangkan total kebutuhan daging konsumsi sebanyak 2,158 ton. Artinya pada tahun 2019 produksi daging belum memenuhi kebutuhan konsumsi. Penurunan Tahun 2020 disebabkan karena penyakit ternak babi sehingga harga ternak babi melonjak tinggi. Sementara pada tahun 2023 produksi daging sebesar 730,83 ton dengan tingkat konsumsi 6,5 kg/kap/tahun dengan kebutuhan daging yaitu 2,104 ton atau sebesar 34,73 %.

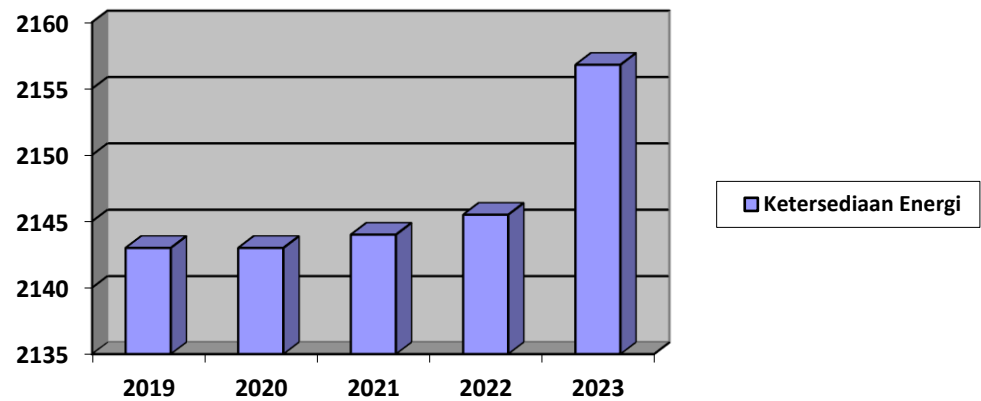
1. Ketersediaan Energi Protein dan Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2.4.

Kondisi Ketersediaan Energi, Protein dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

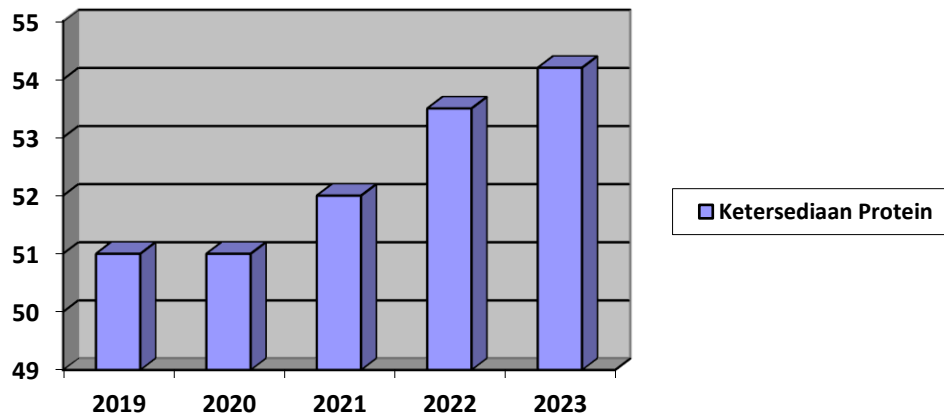
NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perkembangan ketersediaan energi dan protein					
	a. Energi (kalori/hari)	2143	2143	2144	2145,50	2156,80
	b. Protein (gram/hari)	51	51	52	53,50	54,20
2	Skor Pola Pangan Harapan	85	85	87	88,90	89,1

Berdasarkan Tabel 2 diatas, perkembangan ketersediaan energi dan protein mengalami tren kenaikan setiap tahun.



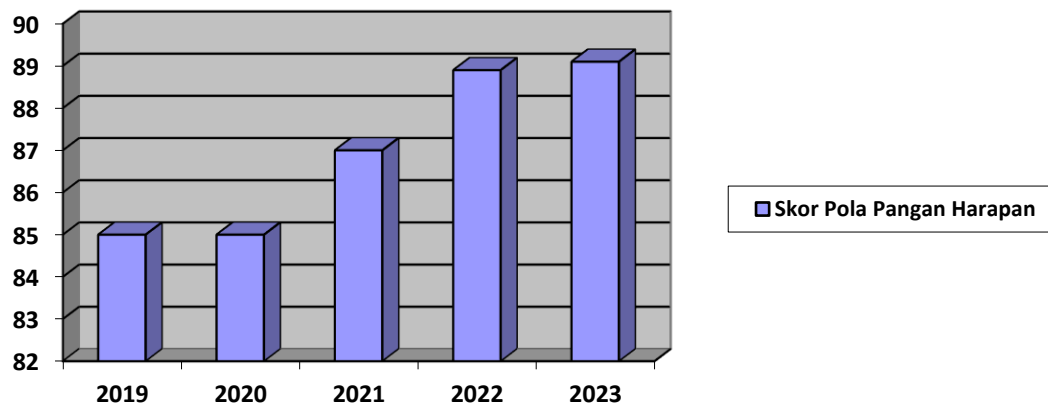
Grafik. 1. Ketersediaan energi

Ketersediaan energi mengalami tren kenaikan meskipun hanya sedikit dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sementara antara tahun 2023 dengan 2022 mengalami kenaikan sekitar 0,48%, hal ini disebabkan karena terlaksananya Penganekaragaman Pangan.



Grafik.2. Ketersediaan Protein

Ketersediaan protein mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata sebesar 52,34 % hal ini disebabkan karena terlaksananya. Penganekaragaman Pangan yang merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal di lihat melalui konsumsi protein.



Grafik.3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tercatat 85 sedangkan tahun 2021 tercatat 87, tahun 2022 sebesar 88,9 sedangkan tahun 2023 tercatat 89,1. Skor ini mengalami kenaikan tetapi masih menunjukkan terbatasnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat.

2. Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka penguatan pemantapan system keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Pengawasan terhadap keamanan pangan mutlak diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Tabel 2.5

Uji laboratorium Residu Pestisida terhadap sampel tanaman buah dan sayuran Tahun 2017 s/d 2019

No	Komoditi	Organochlorine of pesticide			Organophosphate of pesticide			Other of pesticide		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Buncis	< 0,025 (BMR = 0,05)			< 0,025 (BMR = 0,05)		<0,025 (BMR=0,05)			
2	Bawang Merah						< 0,025 (BMR= 0,5)	< 0,005 (BMR = 15)		
3	Kentang	< 0,025(BMR = 0,05)	< 0,025(BMR = 0,05)		< 0,025 (BMR= 0,1)		< 0,025 (BMR= 0,05)			
4	Cabai Merah	< 0,025 (BMR= 0,1)			< 0,025 (BMR = 5,0)	< 0,025 (BMR = 5,0)	< 0,025 (BMR = 5,0)			
5	Jeruk	<0,025 (BMR= 5)			<0,025 (BMR= 0,5)	<0,025 (BMR= 0,7)	<0,025 (BMR= 0,7)			
6	Sawi Putih	<0,025 (BMR= 10)			< 0,025 (BMR= 0,1)	< 0,025 (BMR= 0,1)	< 0,025 (BMR= 0,1)			
7	Tomat	< 0,025 (BMR= 1)			< 0,025 (BMR= 0,5)	< 0,025 (BMR= 0,5)	< 0,025 (BMR= 0,2)			
8	Wortel				<0,025 (BMR=0,2)		<0,025 (BMR=0,2)			
9	Bunga Kol					<0,025 (BMR=0,05)	<0,025 (BMR=0,05)			
10	Cabe Rawit					<0,025 (BMR=5)	<0,025 (BMR=5)			
11	Brokoli					<0,025 (BMR=0,05)	<0,025 (BMR=0,05)			
12	Terong ungu					<0,025 (BMR=0,05)	<0,025 (BMR=0,05)			
13	Sawi Manis						<0,025 (BMR=0,1)			
14	Nenas						<0,025 (BMR=0,05)			
15	Kacang Panjang						<0,025 (BMR=0,05)			

Dari hasil pengujian laboratorium terhadap residu pestisida dapat diketahui bahwa pada dasarnya komoditi pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari tanaman buah dan sayuran masih berada dibawah batas minimum residu (BMR) artinya bahwa komoditi tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Dari 15 sampel komoditi yang diuji residu sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 semuanya masih berada dibawah Batas Minimum Residu (BMR).

3. KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Potensi luas lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal yang belum dimanfaatkan relative masih besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat berperan dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Untuk itu dalam kegiatan KRPL menggunakan konsep pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan anggota kelompok.

Pelaksanaan diversifikasi pangan melalui KRPL telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana komponen KRPL yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah Kelompok Wanita Tani		
		2021	2022	2023
1	Kebun bibit	0	2	3
2	Demplot kelompok	0	2	3

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelompok wanita tani yang telah dibantu dalam pemanfaatan pekarangan melalui KRPL masih sedikit.

4. CAPAIAN URUSAN PERIKANAN

Tabel 2.6.

Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi perikanan tangkap (kg/tahun)					
2	Produksi perikanan budidaya (kg/tahun)	2.136,600	2.988.750	2.860.680	2.901.400	2.958.400
3	Jumlah BBI (Unit)	3	2	2	2	2
4	Jumlah BBI aktif dan berproduksi (unit)	3	2	2	2	2
5	Jumlah kelompok pembudidaya ikan aktif	29	29	30	31	31
6	Jumlah kolam percontohan yang dibangun per tahun (Unit)	6	-	-	-	-

Tabel 2.7

Data Produksi Perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		LUAS AREAL	PETANI IKAN	PRODU KSI	LUAS AREAL (ha)	PETANI IKAN	PRODUKSI (ton)	LUAS AREAL (ha)	PETANI IKAN	PRODUKSI (ton)
1	Perikanan Danau Toba	660	271	334,31	660	201	53,41	660	191	67,93
2	Kolam Air Tenang	485,90	2.175	1.109,65	502,90	2.375	1.435,08	530,50	2.200	1.440,07
	Jaring Apung	0,32	35	381,00	0,30	35	360,00	0,25	35	180,00
	Kolam Air Deras	0,50	30	1,30	0,50	30	1,00	0,50	30	1,00
	Kolam Sawah	772,20	1.815	948,40	774,78	1.715	1.028,20	780,45	1.815	1.250,60
3	Sungai	70,79	750	70,79	21,62	661	21,62	16,83	719	16,83
	Rawa	15,22		15,22	2,10		2,10	1,97		1,97
4	Jumlah Produksi Ikan	2860,67 Ton			2901,40 Ton			2958,40 Ton		
5	Konsumsi/Kapita/Tahun	41,5 kg/kapita/tahun			43,5 kg/kapita/tahun			44,5 kg/kapita/tahun		

Dari Tabel diatas menunjukkan capaian jumlah produksi perikanan pada tahun 2023 adalah sebesar 2.958,40 Ton. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Produksi yang meningkat ini juga diiringi dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 44,5 kg/kapita/tahun meningkat dari tahun sebelumnya 43,5 kg/kapita/tahun. Meningkatnya jumlah produksi tersebut diakibatkan penambahan anggaran untuk pengadaan benih ikan mas, ikan nila, dan lele dumbo yang dibagikan kepada masyarakat/kelompok pembudidaya ikan, pelatihan pembudidaya ikan, pembukaan lahan budidaya (pencetakan

kolam) serta bertambahnya masyarakat/kelompok yang melakukan usaha perikanan. Jumlah produksi ikan sebelum tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (ton)
2019	2.136,60
2020	2.988,75
2021	2.860,67
2022	2.901,40
2023	2.958,40

Dari tabel diatas terjadi kenaikan jumlah produksi ikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi ikan tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap)
2019	35
2020	40,70
2021	41,5
2022	43,5
2023	44,5

Dari tabel diatas terlihat bahwa kebutuhan konsumsi ikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi ikan tersebut masih jauh dibawah target Nasional. Target kebutuhan konsumsi ikan tahun 2023 skala Nasional adalah 56,48 kg/kapita. Berikut merupakan data kelompok perikanan yang telah berbadan hukum untuk usaha budidaya dan sampai dengan Januari 2023 dan kemungkinan akan bertambah.

Tabel. 2.8
DATA KELOMPOK PERIKANAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
YANG BERBADAN HUKUM

No	Nama Kelompok	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Kelompok	Ketua Kelompok
1.	Pokdakan Aek Mas	Tarutung	Aek Siansimun	Kelompok Pembudidaya Ikan	David Lumbantobing
2.	Pokdakan Pemuda Berkarya	Pahae Jae	Setia	Kelompok Pembudidaya Ikan	Sanggam Panjaitan
3.	Pokdakan Maju Ikan Lestari	Pahae Jae	Pardamean Nainggolan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Parningotan Simatumpang
4.	Pokdakan Maju Bersama	Parmonangan	Sisordak	Kelompok Pembudidaya Ikan	Baik Arifon Purba
5.	Pokdakan Oreochromis	Tarutung	Partalitoruan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Otto Hutabarat
6.	Pokdakan Relasi	Pahae Jae	Pardomuan Nainggolan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Luhut Aritonang
7.	Kub Tao Toba Nauli	Muara	Sitanggor	Kelompok Usaha Bersama	Pangihutan Ompusunggu
8.	Pokdakan Dekke Simudur Udur	Parmonangan	Sisordak	Kelompok Pembudidaya Ikan	Ronal Kaisuki Purba
9.	Pokdakan Karya Bersama	Sipoholon	Situmeang Hasundutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Bangun Situmeang
10.	Pokdakan Tapan Nauli	Sipoholon	Situmeang Habinsaran	Kelompok Pembudidaya Ikan	Guring Situmeang
11.	Pokdakan Mina Sukses	Siatas Barita	Sitompul	Kelompok Pembudidaya Ikan	Januari P Pasaribu
12.	Pokdakan Sabolangit Tuma Juma	Pangaribuan	Pakpahan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Untor Pakpahan
13.	Pokdakan Aek Kalian	Sipahutar	Sipahutar I	Kelompok Pembudidaya Ikan	Sofian Lumbantobing
14.	Pokdakan Arina Jaya	Pangaribuan	Pansur Natolu	Kelompok Pembudidaya Ikan	
15.	Pokdakan Berhasil Karya	Pangaribuan	Padang Parsadaan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Halomoan Sormin
16.	Pokdakan Marsada Perubahan	Garoga	Simpang Bolon	Kelompok Pembudidaya Ikan	
17.	Pokdakan Mawar Garoga Nauli	Garoga	Garoga Sibargot	Kelompok Pembudidaya Ikan	
18.	Pokdakan Parbaju Catfish Gold	Tarutung	Parbaju Julu	Kelompok Pembudidaya Ikan	Hermanto Sitompul
19.	Pokdakan Barat Perikanan	Tarutung	Partali Julu	Kelompok Pembudidaya Ikan	Noak Benget H. Hutabarat
20.	Pokdakan Saut Martupa	Siborongborong	Paniaran	Kelompok Pembudidaya Ikan	Lungguk Nababan
21.	Pokdakan Ringgas Mangula Saba	Pangaribuan	Pakpahan	Kelompok Pembudidaya Ikan	
22.	Pokdakan Dos Ni Roha	Tarutung	Parbubu II	Kelompok Pembudidaya Ikan	Jantua Lumbantobing

5. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (PETERNAKAN)

Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Melalui berbagai program bidang peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah didapat capaian hasil kegiatan pembangunan pada bidang peternakan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9.

Perkembangan Populasi dan Produksi Peternakan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi					
	Populasi (ekor)	493	535	654	814	895
	Produksi (Kg/Tahun)	59.160	64.200	78.480	97.680	100.240
2	Kerbau					
	Populasi (ekor)	9.748	9.768	10.028	10043	10054
	Produksi (Kg/Tahun)	116.139	117.216	120.336	120.516	120.648
3	Kambing					
	Populasi (ekor)	1.998	2.296	2.393	2.185	2.105
	Produksi (Kg/Tahun)	949	1.091	1.137	1.038	842
4	Babi					
	Populasi (ekor)	43.698	2.955	9.438	21.483	20.013
	Produksi (Kg/Tahun)	839.002	56.736	181.210	412.474	384.250
5	Itik					
	Populasi (ekor)	432.000	445.730	480.039	511.843	543.733
	Produksi (Kg/Tahun)	90.720	93.603	100.808	107.487	114.183
	Produksi telur (Kg/Tahun)	324.000	334.298	360.029	383.882	407.800
6	Ayam					
	Populasi ayam kampung (ekor)	38.380	45.473	60.044	62.512	64.617
	Produksi (Kg/Tahun)	5.834	6.912	9.127	9.502	10.662
	Produksi telur ayam kampung (Kg/Tahun)	197.383	171.000	223.030	227.363	235.852
7	Produksi susu	297.151	294.990	365.280	367.160	368.927

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

2.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara, masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di dunia khususnya bagi negara-negara berkembang, sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia bahkan dapat menimbulkan krisis sosial. Dari segi kebutuhan pangan diperkirakan besar kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan pangan tidak saja jumlah yang mencukupi, tetapi juga harus memenuhi standar dan kualitas nutrisi. Untuk itu, produksi pertanian harus meningkat sebesar 70 persen agar dapat memenuhi kebutuhan.

Dampak dari perubahan atau anomali iklim dapat juga menambah besarnya kesulitan dan resiko bagi pembangunan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relatif besar terhadap Kabupaten Tapanuli Utara hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih mendukung produksi pangan. Namun demikian, untuk 5 tahun kedepan kemandirian pangan di Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup serius masih banyak tantangan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, namun tidak diikuti oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Hal ini karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan perubahan selera. Dinamika dari sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu dan keragaman jenis dan keamanannya. Sektor pertanian merupakan yang sektor sangat strategis untuk dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global, maka dalam pengembangan sektor pertanian/ketahanan pangan akan menjadi suatu tantangan yang cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada, serta pola makan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan berkembangnya industri pangan dan industri makanan olahan, maka kedepan masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dan murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang semula terfokus pada pangan sumber karbohidrat beralih ke makanan sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan produktif.

Selain itu terjadi perubahan dalam psikologis seseorang dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur “kegengsian” yang merupakan salah satu cara untuk perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan moderen, sehingga muncul istilah perubahan gaya hidup (lifestyle) akan mengubah gaya makan (eat style). Perubahan gaya hidup dan gaya makan akan merupakan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan teknologi pangan, industri pangan olahan berbasis pada bahan pangan lokal dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat melakukan rekonstruksi/perubahan pola hidup dan pola makan yang hanya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok dapat mengubah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang untuk dapat hidup sehat dan produktif antara lain dengan menggunakan berbagai macam cara yaitu baik melalui media massa/elektronik, seminar, pameran, jargon-jargon, ataupun event-event lain di masyarakat untuk dapat merubah pola pangan, dengan demikian bentuk dan jenis pangan olahan yang berbasis bahan pangan lokal bisa terus dikembangkan sesuai selera (preferensi) dan budaya masyarakat.

Dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan perikanan dihadapkan juga pada tantangan yang harus dapat dipecahkan, antara lain :

- a. Semakin pesatnya perkembangan produksi perikanan di kabupaten/kota tetangga yang dapat menjadi kompetitor bagi produk Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Terjadinya pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan.
- c. Rendahnya SDM, kelembagaan kelompok dan penguasaan teknologi bagi pembudidaya ikan

- d. Adanya ancaman penyakit menular ikan

Disamping itu, dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan program peternakan dihadapkan juga pada tantangan yang harus dapat dipecahkan, antara lain: Adanya Anomali iklim, bencana, serangan OPT dan Penyakit Hewan Menular.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi juga memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruhnya potensi sumberdaya alam yang terdapat di Tapanuli Utara dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tapanuli Utara di masa mendatang cukup menjanjikan dengan potensi lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangannya seluas 49.602 ha, dimana terdapat 15.290,01 ha lahan kering yang mempunyai kemiringan lereng 0 – 15% yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Demikian juga dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 10.290 ha. Dari luas tersebut kecamatan yang mempunyai luas dominan adalah Kecamatan Sipahutar, Siborongborong, dan Garoga.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b)

penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan, (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan serta (d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

2.4.2.1. Distribusi Pangan

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil dan bertanggungjawab.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar dapat meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

2.4.2.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi.

Sementara itu terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti posyandu, BPP, penyuluh dari berbagai instansi dan kelembagaan masyarakat, Tim penggerak PKK, kelembagaan ini berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

2.4.2.3. Bidang Perikanan

Untuk dapat menghadapi tantangan di bidang perikanan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa peluang yang telah diidentifikasi, yaitu :

- a. Tingginya animo masyarakat untuk berusaha di bidang perikanan
- b. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai potensi konsumsi dan pasar
- c. Besarnya peluang pemanfaatan potensi sumber daya perikanan sebagai peluang usaha dan lapangan kerja
- d. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam mendukung program pembangunan perikanan
- e. Tersedianya peraturan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan

2.4.2.4. Bidang Peternakan

Untuk dapat menghadapi tantangan di bidang peternakan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa peluang yang telah diidentifikasi, yaitu meningkatkan Pengendalian Penyakit Hewan Menular dan Pelaksanaan Vaksinasi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan tugas dan fungsi adalah:

a. Bidang Urusan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, kelembagaan ketahanan pangan. Dari Aspek ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan permasalahan yang terjadi di Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan terhadap Desa rentan/rawan pangan.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Lemahnya Kelembagaan Pangan
4. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Stabilitas pasokan dan harga pangan belum terkendali.
6. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah
7. Belum optimalnya sistem informasi dan pengendalian daerah rawan pangan dan gizi.

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, antara lain:

1. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan terutama produk pangan segar asal tumbuhan.
3. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal
4. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
5. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan pangan local.

b. Bidang Urusan Perikanan

Pembangunan pada Sektor Perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara ditujukan untuk peningkatan produksi, produktifitas dan mutu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta pembangunan sumberdaya manusia (pelaku usaha dan petugas teknis perikanan). Kegiatan usaha pada sektor perikanan yang menjadi kegiatan unggulan di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu kegiatan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam sawah (minapadi), kolam air deras dan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas unggulan yaitu ikan mas, ikan nila dan ikan lele.

Untuk kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu penangkapan ikan di sungai, rawa dan danau dengan hasil tangkapan utama yaitu ikan mas, nila, mujair, lele, gabus, lobster air tawar, ikan betutu dan ikan batak.

Produksi Usaha Budidaya Ikan pada Tahun 2019 sebesar 2.136,60 ton sedangkan produksi usaha budidaya ikan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 2.988,75 ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran menghadapi dampak Covid-19 dan juga semakin tingginya produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yaitu sebesar 880 ton pada Tahun 2020. Jumlah Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2020 adalah 256 KJA.

Jumlah Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2021 adalah 200 KJA sedangkan produksi Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun 2021 sebesar 381 ton. Pada Tahun 2021 Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Danau Toba untuk mengurangi produksi KJA menjadi 10.000 ton/tahun dan Kabupaten Tapanuli Utara mendapat bagian 300 ton/tahun dengan Jumlah Kerambah Jaring Apung (KJA) sebanyak 100 KJA. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengurangi produksi KJA akan mengakibatkan penurunan produksi ikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Disamping kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi salah satu permasalahan dalam meningkatkan produksi perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, beberapa permasalahan lain yang dihadapi adalah :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Belum optimalnya produksi ikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perikanan dan Teknologi Perikanan yang mempengaruhi ketersediaan benih ikan
4. Tingginya harga pakan pabrikan
5. Belum optimalnya penguatan kelembagaan kelompok perikanan

c. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Unit Peternakan

Pembangunan pada Sektor Peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara ditujukan untuk peningkatan produksi peternakan. Permasalahan yang dihadapi dalam sektor peternakan adalah:

- Kurang optimalnya penanganan terhadap penyakit ternak/hewan
- Belum tercapainya swasembada daging dan telur secara berkelanjutan
- Tingginya harga pakan ternak.
- Minimnya sumber bibit ternak.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima (5) tahun ke depan.

Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 - 2025 dapat dirumuskan yaitu:

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Tapanuli Utara : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
- Lumbung Pangan : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan
- Lumbung Sumber Daya Manusia : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di dalam pengembangan potensi sumber daya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).
- Berkualitas : bermakna perwujudan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat, cerdas, dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

Daerah Tujuan Wisata : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja
6. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
8. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
9. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan system e-government

Dari uraian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara diatas, dapat dilihat bahwa untuk Urusan Pangan, Urusan Perikanan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Peternakan) ada pada misi pertama, yaitu **“Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan”** dengan tujuan **“Meningkatnya Ketahanan Pangan Berkelanjutan”**. Dimana dari tujuan tersebut diturunkan ke dalam 2 (dua) sasaran, yaitu :

- 1) Menurunkan Daerah Rentan rawan pangan.
- 2) Meningkatkan Diversifikasi Pangan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Dari proses pembinaan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada Lembaga koordinatif sinergi horizontal di tingkat pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara saja, akan tetapi berkaitan pula secara vertical di tingkat pusat seperti kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Memperhatikan visi Kementerian Pertanian RI yaitu Terwujudnya pertanian industri unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya local untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani melalui berbagai misi yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan berkontribusi terhadap pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan system pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK sumberdaya lokal serta berawasan lingkungan melalui pendekatan system agribisnis.

Memperhatikan pula visi BKP pusat kementerian Pertanian RI yaitu menjadi institusi handal, aspiratif dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan melalui bberbagai misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berkontribusi terhadap pencapaian misinya yaitu :

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembanguna ketahanan pangan
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional
3. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan daerah
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan evaluasi pelaksanaannya.

Memperhatikan visi Kementerian Kelautan dan perikanan RI yaitu : Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar, melalui misi yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berkontribusi dalam pencapaian tujuannya yaitu memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi.

Memperhatikan visi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yaitu tercapainya kemantapan ketahanan pangan di Sumatera Utara melalui berbagai misi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan penguatan cadangan pangan
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan panganekaragaman dan keamanan pangan berbasis potensi local
5. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis bidang ketahanan pangan.

Memperhatikan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yaitu Prima dalam pelayanan menuju perikanan Sumatera Utara yang tangguh, dinamis dan mandiri dengan berbagai misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berkontribusi terhadap pencapaian misinya yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berdaya saing.

Pada Pemerintah pusat, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Dari uraian telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota saling berhubungan. Dimana Renstra K/L menunjang keberhasilan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Menurut Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Utara memuat kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang cukup luas. Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilakukan dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pangan. Keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara akan menghilangkan ketergantungan pangan kepada daerah lain.

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, dan peternakan yang luas.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan adalah Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Dimana indikatornya adalah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Penentuan Isu-isu Strategis

1. Menurunkan Daerah Rentan rawan pangan.
2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Pangan Lokal.
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan.
4. Peningkatan Produksi Peternakan
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Mempedomani **RPJMD** Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan untuk menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

Tujuan 1 :

Menurunkan Daerah Rentan rawan pangan.

Sasaran :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar
3. Meningkatkan Produksi Ternak

Tujuan 2 :

Meningkatkan Diversifikasi Pangan

Sasaran :

6. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sebagaimana program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2026, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET RENSTRA 2025-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi		Target Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1								
Menurunkan Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan	Persen	18,25	13,10	8,73	5,16	4,37	2,38
Sasaran								
1. Meningkatkan akses pangan masyarakat	Indeks Ketersediaan (IK)	Skor	95,94	95,48	95,45	98,97	95,50	96
	Indeks Keterjangkauan (IA)	Skor	76,97	75,04	75,25	76,57	77	77,50
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar	Produksi Ikan Air Tawar	Ton	2.860,68	2.901,40	2.958,40	3.000	3.020	3.040
	Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	2,22	2,27	2,19	2,38	2,42	2,46
3. Meningkatkan Produksi Ternak	Produksi Daging	Ton	415,28	749,00	730,83	842,19	1,140	1,482
	Populasi Ternak :							
	Kerbau	Ekor	10.028	10.043	10.048	10.179	10.149	10.199
	Sapi	Ekor	654	814	895	667	906	910
	Kambing	Ekor	2.393	2.185	2.105	2.441	2.137	2.147
	Babi	Ekor	9.438	21.483	20.013	16.196	26.417	34.342
	Ayam	Ekor	480.039	511.843	543.733	492.136	554.662	557.435
	Itik	Ekor	60.044	62.512	64.617	61.863	65.916	66.575
Tujuan 2								
Meningkatkan Diversifikasi Pangan	PPH Konsumsi	Skor	87	88,90	89,10	90	91	92
Sasaran								
1. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.144	2.144	2.156,80	2.147	2.148	2.149
	Protein	gram/kapita/hari	52	52	54,20	55	56	57
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	67	69,23	69*	70	71	72

Keterangan: * angka sementara

Acuan dalam menentukan target indikator kinerja sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan Rentan rawan pangan diperoleh berdasarkan data FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021, diharapkan desa rentan rawan pangan dapat dituntaskan dalam kurun waktu 5 tahun. Dari 46 desa/kelurahan yang mengalami rentan rawan pangan, ditetapkan target penurunan desa rentan rawan pangan yaitu sebanyak 11 desa/kelurahan ($\pm 4.36\%$) sehingga pada tahun 2024 desa/kelurahan rentan rawan pangan tersisa 13 desa/kelurahan. Sedangkan untuk tahun 2025 jumlah desa/kelurahan rentan pangan diharapkan menjadi 11 desa/kelurahan dan 2026 menjadi 6 desa atau 2,38%.
2. Untuk Indeks Keterjangkauan

Keterjangkauan Tahun 2021 s/d 2023

No	Indeks Keterjangkauan Pangan				
		Tapanuli Utara		Sumatera Utara	
1	2021	76,97	-	74.5	-
2	2022	75,04	-1.93	75.02	-3.49
3	2023	75,25	0.21	80.17	0.6

Dari data Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa Indeks Keterjangkauan Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,93 namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 75,25 atau sebesar 0,21. Berdasarkan data trend tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menargetkan kenaikan nilai Indeks Ketersediaan sebesar $\pm 0,5$ per tahun dari target 2024 sebesar 76,57.

3. Untuk Indeks Ketersediaan

Keterjangkauan Tahun 2021 s/d 2023

No	Indeks Ketersediaan Pangan				
		Tapanuli Utara		Sumatera Utara	
1	2021	95,94	-	82.41	-
2	2022	95,48	0.46	80,19	-2.22
3	2023	95,45	0.03	80.27	0.08

Dari data Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa Indeks Ketersediaan Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,46 namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 95.45 atau sebesar 0,03. Berdasarkan data trend tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tapanuli Utara menargetkan kenaikan nilai Indeks Ketersediaan sebesar $\pm 0,5$ per tahun.

4. Untuk target indikator kinerja Produksi Ikan Air Tawar Hasil diperoleh dari perhitungan rata-rata capaian dari tahun 2021 s/d 2023 dan namun karena adanya Program Penutupan Kerambah Jaring Apung (KJA) di Muara yang menyebabkan penurunan produksi ikan dengan Kerambah Jaring Apung dari tahun ke tahun jadi rata-rata kenaikan target produksi ikan adalah 20 ton/tahun. Jumlah Produksi Air Tawar akan mempengaruhi Produktivitas Ikan Air Tawar rata-rata kenaikan target per tahun adalah 0,04 ton/ha.
5. Perbandingan produksi daging dari tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat penurunan di tahun 2022 sebanyak 18,17 ton, hal ini disebabkan karena ternak ayam dan itik yang banyak mati disebabkan oleh Virus ND (New Castle Disease). Namun
6. Untuk target indikator kinerja Populasi Ternak diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata capaian Populasi Ternak dari tahun 2015-2019 rata-rata kenaikannya adalah sebagai berikut :
 - Kerbau rata-rata kenaikan targetnya adalah 64 ekor per tahun
 - Sapi rata-rata kenaikan targetnya adalah 7 ekor per tahun
 - Kambing rata-rata kenaikan targetnya adalah 23 ekor per tahun
 - Babi rata-rata kenaikan targetnya adalah 537 ekor per tahun
 - Ayam rata-rata kenaikan targetnya adalah 1.675 ekor per tahun
 - Itik rata-rata kenaikan targetnya adalah 475 ekor per tahun
7. Untuk target indikator kinerja PPH Konsumsi diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata capaian Skor PPH dari tahun 2016-2020 rata-rata kenaikannya adalah 1 skor per tahun.
8. Untuk Konsumsi Energi dan Protein proses perhitungannya memakai 1 (satu) aplikasi dengan penentuan Skor PPH. Oleh karena itu rata-rata kenaikan skor PPH yang 1 skor per tahun sama dengan kenaikan target konsumsi energi dan protein 1 point per tahun.

Untuk Konsumsi Energi tahun 2019-2024 Kabupaten Tapanuli Utara sudah melebihi Skala Nasional yaitu 2100 kkal/kap/tahun dan sedikit dibawah Skala Provinsi yaitu 2150 kkal/kap/tahun sehingga ditargetkan mendekati Skala Provinsi. Untuk Konsumsi Protein tahun 2019-2024 Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawah Skala Nasional yaitu 57 gram/kap/hari.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Ketahanan Pangan

Strategi meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama, meliputi:

1. Menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan.
2. Pemenuhan Pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan.
3. Memperkuat akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan.
4. Mempercepat Penganekaragaman (Diversifikasi) Pangan.
5. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal.
6. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, maka disusun langkah operasional/Program Aksi sebagai berikut:

- a. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui :
 - Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)
 - Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan
 - Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan
 - Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- b. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindak lanjut gejolak harga pangan;

- Kajian Distribusi Pangan.
- c. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
 - Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
 - Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
 - Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

Strategi Perikanan adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.
2. Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan.

Strategi Peternakan adalah : Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner Peningkatan penggunaan bibit unggul ternak.

Strategi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah

1. Keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Ketahanan Pangan :

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan antara lain :

Dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:

1. Stabilisasi pasokan dan harga pangan
2. Pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada :

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan local ; dan ditunjang dengan Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Dalam implementasinya tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain :

1. Peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan
2. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat
3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan

Arah Kebijakan Perikanan yaitu:

1. Intenfikasi dan Ektensifikasi kegiatan usaha perikanan
2. Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk-produk perikanan
3. Peningkatan validitas data perikanan

Arah Kebijakan Peternakan yaitu:

1. Fasilitasi bahan obat- obatan ternak,
2. Fasilitasi petugas ternakan.

Arah Kebijakan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Mengatasi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah dan Perangkat Daerah.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
PADA Rencana Awal Renstra 2025-2026

VISI : Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata			
MISI 1 : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan Daerah Rawan Pangan	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan. Pemenuhan Pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan. Memperkuat akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan.	Dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada : Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: Stabilisasi pasokan dan harga pangan Pengelolaan cadangan pangan.
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar	Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan usaha perikanan Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk-produk perikanan Peningkatan validitas data perikanan
	Meningkatkan Produksi Ternak	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner Peningkatan penggunaan bibit unggul ternak	Fasilitasi bahan obat- obatan ternak, Fasilitasi petugas ternakan.
Meningkatkan Diversifikasi Pangan	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Mempercepat Penganekaragaman (Diversifikasi) Pangan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.	Dalam Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada : Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan local ; dan ditunjang dengan Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja	Mengatasi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah dan Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022				PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya	Kinerja	Biaya	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 1 :															
Menurunkan Daerah Rentan Pangan		Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	13,89	-	13,10	-	9,52	-	5,16	-	4,37		2,38	-
Sasaran :															
1. Meningkatkan akses pangan masyarakat		Indeks Ketersediaan (IK)	Skor	96,95	-	95,48	-	97,96	-	98,97	-	95,5		96	-
		Indeks Keterjangkauan (IA)	Skor	75,57	-	75,04	-	76,07	-	76,57	-	77		77,5	-
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar		Produksi Ikan Air Tawar	Ton	2.900	-	2.901,40	-	2.950	-	3.000	-	3020		3040	-
		Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	2,3	-	2,27	-	2,34	-	2,38	-	2		2,46	-
3. Meningkatkan Produksi Ternak		Populasi Daging	Ton	539,86	-	749	-	701,87	-	842,19	-	1,140		1,482	-
		Populasi Ternak :			-		-		-		-				-
		Kerbau	Ekor	10.078	-	10.043	-	10.129	-	10.179	-	10.149		10.199	-
		Sapi	Ekor	661	-	814	-	664	-	667	-	906		911	-
		Kambing	Ekor	2.417	-	2.185	-	2.429	-	2.441	-	2.137		2.147	-
		Babi	Ekor	10.382	-	21.483	-	12.458	-	16.196	-	26.417		34.342	-
		Ayam	Ekor	484.839	-	511.843	-	489.688	-	492.136	-	554.662		557.435	-
		Itik	Ekor	60.644	-	62.512	-	61.251	-	61.863	-	65.916		66.575	-
Tujuan 2 :															
Meningkatkan Diversifikasi Pangan		PPH Konsumsi	Skor	88	-	88,9	-	89	-	90	-	91		92	-
Sasaran :															
1. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Konsumsi Energi	kkal/kap/hari	2145	-	2.145,5	-	2146	-	2147	-	2148		2149	-
		Protein	gr/kap/ hari	53	-	53,5	-	54	-	55	-	56		57	-
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	68	-	68	-	69	-	70	-	71		72	-

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		2022		PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	4.550.000.000	100	3.992.771.014	100	4.733.775.228	100	4.663.599.460	100	5.929.072.493	100	6.466.704.935
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	5	45.000.000	5	44.703.700	5	90.000.000	7	56.000.000	7	113.000.000	7	124.300.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		2		2		2	8.000.000	2	10.500.000	2	11.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1	5.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0		0		0		1	5.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		1		1		1	5.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0		0		0		1	5.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		1		1		1	6.000.000	1	10.500.000	1	11.550.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4		4	22.000.000	4	60.000.000	4	66.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3.189.995.886	3	3.126.664.947	3	3.693.619.978	3	3.800.999.460	3	4.571.529.617	3	5.024.232.059
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42						39	3.738.394.260	47	4.503.924.417	47	4.954.316.859
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1						1	6.000.000	1	11.000.000	1	13.310.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	16						6	56.605.200	6	56.605.200	6	56.605.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD	Jenis	6	249.464.800	6	248.893.372	6	301.999.300	6	150.100.000	6	389.500.000	6	428.450.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4				12	6.000.000	13	10.500.000	13	11.550.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4				28	15.000.000	39	37.000.000	39	40.700.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		4				16	12.100.000	30	21.000.000	30	23.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		4				3	12.000.000	3	23.000.000	3	25.300.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4.488		4.488				2.177	12.000.000	4.070	26.000.000	4.100	28.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30		30				365	93.000.000	419	272.000.000	422	299.200.000

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022				PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jenis	2	82.390.800	2	81.664.800	2	56.474.000	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34		34				2	35.000.000	3	38.500.000	4	42.350.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5		5				5	115.000.000	7	126.500.000	9	139.150.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	300	410.990.900	300	400.923.850	299	459.268.900	3	411.500.000	3	547.042.876	3	550.922.876
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	242		242				150	1.500.000	180	1.800.000	198	1.980.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36		36				36	24.000.000	36	37.000.000	36	40.700.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	21		21				12	386.000.000	12	508.242.876	12	508.242.876
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	94.885.350	3	89.920.345	3	132.413.050	3	95.000.000	3	143.000.000	3	157.300.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							3	71.000.000	3	89.000.000	3	97.900.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							4	3.500.000	4	10.000.000	4	11.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							10	20.500.000	10	44.000.000	10	48.400.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dengan 2 Indikator kinerja yaitu :			444.993.100		440.934.000		439.999.920						
		1. Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi	Persen	3,76		3,007		4,16		4,57	525.000.000	4,57	506.700.000	4,97	557.370.000
		2. Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen	18,60		9,30		23,26		27,91		46,15		53,85	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Jenis	2	70.000.000	2	68.574.900	2	70.000.000,00	3	70.000.000	3	155.000.000	3	170.500.000
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan									1	60.000.000	1	66.000.000
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit							5	30.000.000	5	35.000.000	5	38.500.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen							1	20.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan							1	20.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022				PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	ton	3.007	69.993.100	3.007	69.624.100	2.734	64.999.920	6.120	150.000.000	2,80	87.700.000	2,9	96.470.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton							6.120	100.000.000	2,80	60.200.000	2,9	66.220.000
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton							6.120	50.000.000	6.732	27.500.000	7.405	30.250.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Jenis	2	305.000.000	2	302.735.000	2	305.000.000	2	305.000.000	2	264.000.000	2	290.400.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan							1	225.000.000	1	176.000.000	1	193.600.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan							1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa/Kelurahan	35	130.006.900	33	129.718.900	24	265.000.000	13	250.000.000	11	285.000.000	6	313.500.000
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen									1	35.000.000	1	38.500.000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen									1	35.000.000	1	38.500.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis	1	130.006.900	1	129.718.900	1	265.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000
	Pembinaan Desa Mandiri Pangan	Jumlah temak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	ekor									1.956	120.000.000	2.152	132.000.000
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah balita stunting yang mengalami rawan pangan	orang							162	250.000.000	165	130.000.000	182	143.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	20	25.000.000	20	24.020.000	24	25.000.000	28	75.000.000	47,82	75.000.000	52,17	82.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Sampel	10	25.000.000	10	24.020.000	14	25.000.000	22	75.000.000	22,00	75.000.000	24,00	82.500.000
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							22	75.000.000	22	75.000.000	24	82.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3 indikator yaitu :			1.597.571.432		1.648.482.600		1.577.571.500						
		- Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200		120		200		200				200	
		- Luas Lahan Budidaya	Ha	20		20		25		30				35	
		- Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	819.161		853.209		891.577	71658	963.235		1.039.558		1.126.014	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jenis	4	1.597.571.432		1.648.482.600	4	1.577.571.500	4	1.700.000.000	4	2.363.213.000	4	2.599.534.300

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022				PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit							7	500.000.000	8	550.000.000	9	605.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit							2	150.000.000	2	180.000.000	2	198.000.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang							100	550.000.000	100	803.213.000	100	883.534.300
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit							30	500.000.000	35	830.000.000	40	913.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3 indikator yaitu :			566.072.000		529.589.700		1.298.494.820						
		- Jumlah Bibit ternak yang disebar	Ekor	10.550		10.550		7.590		5.300		5.060		4.300	
		- Jumlah Kelompok Tani Penerima	Kelompok	50		50		80		40		60		70	
		- Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan	Ekor	150		150		150		155		155		155	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan	1	166.082.800	1	132.204.600	1	809.994.820	1	250.000.000	1	230.000.000	1	253.000.000
	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan							158	150.000.000	158	175.000.000	158	192.500.000
	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan							144	100.000.000	60	55.000.000	70	60.500.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak	Ekor	10.550	146.082.800	10.550	397.385.100	21	789.994.820	175	500.000.000	5.060	620.400.000	4.300	682.440.000
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor							175	500.000.000	5.060	620.400.000	4.300	682.440.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	Unit	1	149.999.200	1	124.807.000	1	972.069.000	1	600.000.000	2	836.000.000	2	919.600.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Dokumen	1	149.999.200	1	124.807.000	0	0	1	600.000.000	2	836.000.000	2	919.600.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit							2	600.000.000	2	836.000.000	2	919.600.000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3 indikator yaitu :			679.991.900		625.594.050		465.573.090						
		- Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Kasus	3.600		3.600		3.100		3.850		3.200		3.300	
		- Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan	Kasus	5.400		5.400		3.450		5.650		7.000		7.100	

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022				PERUBAHAN RENSTRA				RENSTRA 2025-2026			
				Target		Capaian		2023		2024		2025		2026	
				Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)													
		- Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskesmas	Kasus	900		900		950		12		12		12	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah	15	579.999.700		552.467.900	15	285.000.000	15	400.000.000	15	440.000.000	15	484.000.000
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan							15	200.000.000	15	260.000.000	15	286.000.000
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan							15	200.000.000	15	180.000.000	15	198.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	99.992.200	12	73.126.150	12	180.573.090	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan							12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000
	JUMLAH				9.840.359.368				9.777.483.558		9.013.599.460		11.340.385.493		12.419.149.235

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
Tujuan 1 :									
Menurunkan Daerah Rentan Pangan		Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	13,89	13,10	9,52	5,16	4,37	2,38
Sasaran :									
1. Meningkatkan akses pangan masyarakat		Indeks Ketersediaan (IK)	Skor	96,95	95,48	97,96	98,97	95,5	96
		Indeks Keterjangkauan (IA)	Skor	75,57	75,04	76,07	76,57	77	77,5
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar		Produksi Ikan Air Tawar	Ton	2.900	2.901,40	2.950	3.000	3020	3040
		Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	2,3	2,27	2,34	2,38	2	2,46
3. Meningkatkan Produksi Ternak		Populasi Daging	Ton	539,86	749	701,87	842,19	1,140	1,482
		Populasi Ternak :							
		Kerbau	Ekor	10.078	10.043	10.129	10.179	10149	10199
		Sapi	Ekor	661	814	664	667	906	911
		Kambing	Ekor	2.417	2.185	2.429	2.441	2137	2147
		Babi	Ekor	10.382	21.483	12.458	16.196	26417	34342

		Ayam	Ekor	484.839	511.843	489.688	492.136	554662	557435
		Itik	Ekor	60.644	62.512	61.251	61.863	65916	66575
Tujuan 2 :									
Meningkatkan Diversifikasi Pangan		PPH Konsumsi	Skor	88	88,9	89	90	91	92
Sasaran :									
1. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2145	2.145,5	2146	2147	2148	2149
		Protein	gram/kapita/ hari	53	53,5	54	55	56	57
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	68	68	69	70	71	72

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	5	5	5	7	7	7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3	3	3	3	3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42			39	47	47

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1			1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	16			6	6	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum PD	Jenis	6	6	6	6	6	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		12	13	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		28	39	39
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		16	30	30
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		3	3	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4.488	4.488		2.177	4.070	4.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30		365	419	422
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jenis	2	2	2	2	2	2
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	34		2	3	4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		5	7	9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	300	300	299	3	3	3
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	242	242		150	180	198
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36		36	36	36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	21	21		12	12	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	3	3	3	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				3	3	3
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				4	4	4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				10	10	10
		Dengan 2 Indikator kinerja yaitu :							

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi	Persen	3,76	3,007	4,16	4,57	4,57	4,97
		2. Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	Persen	18,60	9,30	23,26	27,91	46,15	53,85
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Jenis	2	2	2	3	3	3
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan					1	1
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit				5	5	5
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen				1	1	1
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan				1	1	1
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	ton	3.007	3.007	2.734	6.120	2,80	2,9
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton				6.120	2,80	2,9
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton				6.120	6.732	7.405
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Jenis	2	2	2	2	2	2
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan				1	1	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan				1	1	1
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa/Kelurahan	35	33	24	13	11	6
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen					1	2
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen					1	2
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis	1	1	1	1	1	1
	Pembinaan Desa Mandiri Pangan	Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	ekor					1.956	2.152
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah balita stunting yang mengalami rawan pangan	orang				162	165	182

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	20	20	24	28	47,82	52,17
	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi</i>	<i>Sampel</i>	10	10	14	22	22,00	24,00
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				22	22	24
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3 indikator yaitu :							
		- Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	200	120	200	200	200	200
		- Luas Lahan Budidaya	Ha	20	20	25	30	35	40
		- Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	819.161	853.209	891.577	963.235	1.039.558	1.126.014
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Jenis</i>	4		4	4	4	4
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit				7	8	9
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit				2	2	2
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang				100	100	100
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit				30	35	40
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3 indikator yaitu :							
		- Jumlah Bibit ternak yang disebar	Ekor	10.550	10.550	7.590	5.300	5.060	4.300
		- Jumlah Kelompok Tani Penerima	Kelompok	50	50	80	40	60	70
		- Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan	Ekor	150	150	150	155	155	155
	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak</i>	<i>Laporan</i>	1	1	1	1	1	1
	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan				158	158	158
	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan				144	60	70
	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>Jumlah Benih/Bibit Ternak</i>	<i>Ekor</i>	10.550	10.550	21	175	5.060	4.300
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor				175	5.060	4.300

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		PERUBAHAN RENSTRA		RENSTRA 2025-2026	
				Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
				Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	Unit	1	1	1	1	2	2
	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				2	2	2
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3 indikator yaitu :							
		- Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Kasus	3.600	3.600	3.100	3.850	3.200	3.300
		- Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	Kasus	5.400	5.400	3.450	5.650	7.000	7.100
		- Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskesmas	Kasus	900	900	950	12	12	12
	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Wilayah</i>	<i>15</i>		<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan				15	15	15
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan				15	15	15
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan				12	12	12

BAB VIII. P E N U T U P

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberhasilkan Program-Program pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dalam implementasinya perlu dijabarkan secara rinci setiap tahun dalam sasaran kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan penanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk memfasilitasi rencana tahunannya dengan memperhatikan evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan pemantapan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan tersusunnya Renstra 2025-2026 diharapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam rentang waktu Tahun 2025-2026 akan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tarutung,